

## Jadikan Aku Pustakawan

Oleh:

Fitri Hafifah, A. Md\*, Ikhwan Arif, S.I.P \*\*

### Abstrak

Dalam tulisan ini menguraikan tentang usaha yang dicapai untuk mengaktualisasikan profesi Pustakawan di masyarakat. Di bab lain berisi analisa minimnya jumlah Pustakawan di Indonesia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan tenaga ini khususnya bidang sekolah. Perpustakaan seharusnya dapat dijadikan tempat atau sarana untuk membantu menggairahkan semangat belajar, menumbuhkan minat baca dan mendorong untuk membiasakan siswa belajar secara mandiri, karena perpustakaan berfungsi sebagai sarana edukatif, informatif, riset dan rekreatif. Namun kenyataannya belum semua sekolah memiliki perpustakaan. Sedangkan sekolah yang telah mempunyai perpustakaan, belum memenuhi harapan tersebut, yang disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain: (1) Lokasi perpustakaan yang kurang nyaman (kondusif), jam buka yang sangat terbatas (hanya pada saat jam istirahat sekolah), koleksi buku terbatas, fasilitas kurang memadai, dana terbatas; (2) Pengelolaan yang kurang profesional; (3) Guru kurang berpartisipasi dalam pemanfaatan perpustakaan bagi siswa; dan (4) Kurangnya koordinasi antar perpustakaan. Perlu dilakukan langkah-langkah yang nyata untuk mengembangkan pustakawan menjadi profesi yang bisa dibanggakan. Mengingat arti penting perpustakaan dalam proses pendidikan dan usaha pencerdasan bangsa, keberadaan perpustakaan perlu diikuti dengan jumlah Pustakawan yang memadai.

Kata kunci: *kebutuhan pustakawan; profesionalisme pustakawan*

### Pendahuluan

#### Latar Belakang

Telah lama orang menyadari bahwa keberadaan perpustakaan sangat berperan dalam proses mencerdaskan bangsa, mengentaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan. Di sekolah, keberadaan perpustakaan diposisikan sebagai sarana dalam menggairahkan semangat belajar, menumbuhkan minat baca dan mendorong siswa belajar secara mandiri. Di perguruan tinggi perpustakaan diibaratkan sebagai “jantung” yang mengalirkan informasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan akademik bagi seluruh civitas akademika. Di perpustakaan, setiap koleksi merupakan aset yang bernilai dan membutuhkan pengelolaan serta perawatan secara tepat dan profesional. Namun demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemberian perhatian dan penghargaan yang pantas bagi Pustakawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Profesi Pustakawan “nyaris tak terdengar” dan kurang mendapat simpati di masyarakat. Bagi sebagian PNS saat ini jabatan fungsional masih dianggap sebagai jalur untuk memperpanjang batas usia pensiun, sehingga banyak Pustakawan yang menduduki jenjang jabatan tinggi tidak diimbangi dengan kompetensi yang dipersyaratkan<sup>1</sup>. Banyak mahasiswa mengambil studi kepustakawanan hanya sebagai pilihan akhir karena sulitnya menembus jurusan lain. Apabila dilontarkan pertanyaan, “Siapa yang mau menjadi Pustakawan?”, maka dapat diduga bahwa pertanyaan ini tidak akan mendapat tanggapan yang

---

\* Pustakawan honorer, SD Muhammadiyah 1 Wirobrajan, Yogyakarta.

\*\* Pustakawan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>1</sup> Dady P. Rachmananta. Sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan. 2006.

memuaskan<sup>2</sup>. Di masa lalu ada anggapan bahwa perpustakaan adalah unit kerja tempat pembuangan pegawai yang sudah tidak memiliki produktifitas dan prestasi. Jika demikian, “Apakah menjadi Pustakawan berarti memasukkan diri ke dalam kelompok orang-orang terbuang?”. Sementara itu masih banyak orang menganggap bahwa perpustakaan dapat diurus oleh siapa saja.

Rendahnya perhatian elemen bangsa terhadap perpustakaan (Pustakawan), membuat perpustakaan belum mampu menghasilkan *outcome* secara maksimal<sup>3</sup>. Anggapan bahwa perpustakaan dapat diurus oleh siapa saja bisa dibenarkan pada jenis perpustakaan yang sekedar difungsikan sebagai gudang buku, taman bacaan atau tempat transaksi buku saja. Namun untuk perpustakaan yang difungsikan dengan benar sebagai sarana pendidikan, riset dan rekreasi keberadaan Pustakawan sangat dibutuhkan.

Konsekuensi lain adalah, sebagian besar jabatan Pustakawan dipegang oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi di bidang kepastakawanan. Bahkan seperti disampaikan oleh Harkrisyati Kamil dalam Rakerpus IPI di Pekanbaru Riau, Juni 2005, posisi penting di bidang informasi banyak diduduki oleh orang dengan latar belakang keuangan, teknologi informasi, dan personalia<sup>4</sup>. Dampak lain adalah rendahnya kinerja atau profesionalitas Pustakawan yang menyebabkan pengelolaan perpustakaan di masyarakat tidak bisa berkembang sesuai yang diharapkan.

Republika, 21-11-2005 melaporkan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur ternyata sangat minim perhatian dari kepala daerahnya. Selain koleksinya hanya seadanya, kondisi gedung juga tak memadai. Keberadaan perpustakaan sebagai pelengkap dan aksesoris tempat kerja pejabat saja. Ditambah lagi dengan masih banyak pengajuan anggaran yang dilakukan untuk pengembangan perpustakaan yang ditolak oleh kepala daerah<sup>5</sup>.

Inilah salah satu bentuk tantangan yang dihadapi oleh dunia kepastakawanan di Indonesia. Idealisme kepastakawanan yang menawarkan nilai-nilai budaya yang luhur serta lingkungan yang indah dihadapkan pada saluran lain yang menawarkan ragam nilai lain, yang sayang menyimpang jauh dari idealisme keluhuran budi pekerti dan intelektual.

Untuk bisa memainkan peranan di masyarakat secara optimal, tidak cukup hanya dilakukan dengan penyediaan sistem, infrastruktur, jaringan sarana dan prasarana, namun diperlukan upaya yang sistematis dan sungguh-sungguh untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Pustakawan. Pengembangan SDM Pustakawan, harus dirancang dengan suatu kerangka yang bertitik tolak kondisi yang ada, kemudian disusun harapan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Setelah itu disusun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencapai tantangan tersebut.

---

<sup>2</sup> Perpustakaan Nasional RI: Naskah Akademika RUU Perpustakaan 2006.

<sup>3</sup> Supriyanto (Sekretaris Utama PNRI). Meraih Citra Darma Pustaloka. Republika, 21-11-2006.

<sup>4</sup> Ninis Agustini Damayanti. Lokakarya Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan di Indonesia. Jakarta, Juli 2005.

<sup>5</sup> Republika, 21-11-2005. Bupati-Wali Kota Kurang Peduli Perpustakaan.

## Perumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan, maka perumusan masalah adalah: upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan SDM Pustakawan di Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, serta menyusun harapan yang diinginkan?

## Pengertian Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi<sup>6</sup>. Sedangkan Pustakawan sekolah menurut Manifesto Perpustakaan Sekolah *IFLA/UNESCO* tahun 2000 adalah anggota staf berkualifikasi profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, Pustakawan dibantu staf yang cukup, bekerja sama dengan semua anggota komunitas sekolah seperti siswa, guru, kepala sekolah, staf sekolah, komite sekolah dan berhubungan dengan perpustakaan umum dan lainnya.

## Konsep Pengembangan Pustakawan

Konsep pengembangan Pustakawan bertujuan untuk meningkatkan mutu, jumlah dan pendayagunaan Pustakawan agar mampu mengatasi beberapa kesenjangan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan sumber dan akses informasi di perpustakaan. Pengembangan Pustakawan tidak hanya tertuju pada kepentingan perpustakaan saja, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa upaya mendorong kemampuan Pustakawan tidak akan bermakna apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

## Pustakawan Di Indonesia

### Perkembangan Pustakawan

Pengembangan Pustakawan menjadi suatu profesi sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1973 dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia (baca i-pe-i) yang disepakati dalam Kongres Pustakawan Seluruh Indonesia di Ciawi, Bogor, pada Juli 1973. Meskipun organisasi profesi ini sampai sekarang tidak populer di masyarakat kita dan belum sekuat dan sebesar organisasi profesi lainnya seperti organisasi profesi dokter, guru, dan lainnya. Namun keberadaan IPI sedikit banyak telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kepustakawanan di negeri ini, melalui berbagai kegiatan pengembangan perpustakaan seperti seminar, workshop, *training* dan lainnya. Selain perkembangan dalam bidang keorganisasian, beberapa perkembangan lain di bidang kepustakawanan saat ini juga berkembang, antara lain ditandai dengan:

1. Pengakuan Pustakawan sebagai profesi oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Keputusan Menpan Nomor 18 Tahun 1988, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 132 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
2. Dibukanya program studi kepustakawanan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mulai dari tingkat diploma sampai dengan magister (S2) seperti UI, UGM, UNPAD, USU, UNAIR, IPB dan lainnya yang telah menghasilkan banyak tenaga Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli.
3. Walaupun masih relatif sedikit jumlahnya keberadaan perpustakaan di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) relatif lebih maju baik dalam segi koleksi maupun sarana TIK pendukungnya. Beberapa PTN dan PTS telah mengembangkan mengembangkan

<sup>6</sup> Pusat Pengembangan Pustakawan. Perpustakaan Nasional RI.

perpustakaan digital. Bahkan model jaringan IDLN (*Indonesia Digital Library Network*) telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mencari informasi dan telah banyak model yang ditiru dan dikembangkan oleh perpustakaan di banyak negara.

### Hambatan SDM Pustakawan

Meskipun ada kemajuan seperti diuraikan di atas, namun ada beberapa kelemahan yang menyebabkan rendahnya profesionalisme Pustakawan, antara lain:

1. Banyak Pustakawan yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Minimnya tunjangan bisa berakibat rendahnya motivasi kerja, banyak Pustakawan yang memilih profesi ini sebagai jalur untuk memperpanjang usia kerja saja.
2. Sebagian Pustakawan memiliki kecenderungan sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak suka bila ada orang lain masuk. Sosialisasi dan hubungan Pustakawan Indonesia dengan komunitas profesi lain sangat terbatas. Dalam era apapun Pustakawan perlu terbuka terhadap orang dan dunia orang lain agar dunia kepastakawanan tidak terisolir dari masyarakat<sup>7</sup>.
3. Banyak Pustakawan lemah dalam penguasaan bahasa Inggris dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain menimbulkan kelambatan dalam bekerja, hal ini juga berakibat terisolasinya dari dunia kepastakawanan internasional. Dalam beberapa *event* internasional tidak banyak Pustakawan kita bisa berpartisipasi karena lemahnya penguasaan bahasa Inggris. Banyak kesempatan yang ada didominasi oleh negara-negara berkembang lain seperti Philipina, Vietnam, Sri Lanka dan India.
4. Minimnya tulisan dan penelitian kepastakawanan yang dihasilkan Pustakawan. Sebagai orang yang paling dekat dengan sumber informasi seharusnya Pustakawan bisa menghasilkan banyak tulisan dan penelitian. Tulisan yang ada pun ternyata banyak yang berputar di lingkungannya sendiri karena motif “mengejar setoran” angka kredit kenaikan pangkat/jabatan. Hal ini berakibat tidak banyak orang yang mengenal dunia kepastakawanan.
5. Minimnya fungsi IPI sebagai organisasi profesi yang dirasa tidak membunai baik bagi anggota maupun masyarakat. Lahirnya beberapa asosiasi Pustakawan bisa diindikasikan sebagai sikap berontak atau kritik terhadap keberadaan IPI yang kurang menyentuh kepentingan mereka.

### Analisa Jumlah Pustakawan

Untuk menggambarkan dan menganalisa jumlah Pustakawan secara sederhana, selanjutnya penulis membuat gambaran kondisi jumlah Pustakawan di Indonesia dibandingkan dengan jumlah sekolah di Indonesia. Dalam sub bab ini akan dianalisa jumlah Pustakawan dihubungkan dengan jumlah sekolah (SD, SLTP, SLTA, PT). Data Sekolah diperoleh dari data sekolah yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)<sup>8</sup> yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedang data jumlah Pustakawan PNS diperoleh dari Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI, Februari 2007. Sekolah yang memiliki NPSN di Indonesia adalah 229.937 sekolah, sedang jumlah Pustakawan yang bekerja di bidang perpustakaan sekolah sebesar 1441 orang.

<sup>7</sup> Hernandono: Meretas Kebuntuan Kepustakawanan Indonesia Dilihat Dari Sisi Sumber daya Tenaga Perpustakaan. Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Pustakawan Utama. 2005.

<sup>8</sup> Data Statistik Nomor Pokok Sekolah Nasional. [http://npsn.diknas.go.id/cont/data\\_statistik/index.php](http://npsn.diknas.go.id/cont/data_statistik/index.php). diupdate 27 -07-2006 diakses 10-08-2007 (data diolah kembali)

Tabel 1. Jumlah Sekolah dan Pustakawan

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Pustakawan	Rasio
SD	165.078	0	0%
SLTP	39.097	124	0.03%
SLTA	21.549	94	0.3%
PT	2.740	1.223	44%
	229.187	1.441	0.62%

Sumber: diolah dari NPSN Diknas 2006 dan Pusat Pengembangan Pustakawan 2007.

Melihat rasio tabel di atas memperlihatkan tidak seimbangny jumlah perpustakaan dan Pustakawan di negara kita. Jika dibandingkan keberadaan sekolah dengan ketersediaan Pustakawan sangat tidak sepadan. Hal yang sama terjadi pada perbandingan untuk tingkat SLTP dan SLTA. Dalam sistem pendidikan kita, biduk perpustakaan dibiarkan berjalan tanpa nahkoda. Sangat dimaklumi jika keberadaan perpustakaan kita hanya diposisikan sebagai pelengkap saja tanpa didukung oleh SDM Pustakawan yang memadai. Terlalu banyak perpustakaan sekolah kita yang tidak dikelola dengan benar dan keberadaannya mubazir tanpa Pustakawan. Dunia pendidikan di negara ini masih dilaksanakan secara tradisional terutama untuk tingkat pendidikan sekolah dasar<sup>9</sup>. Hal ini menandakan bahwa sistem persekolahan kita kurang memberi peluang bagi tradisi literasi kepada peserta didik. Model pengajaran di kelas pada umumnya masih bersandar pada tataran lisan guru yang terlalu banyak bicara, sedangkan siswa terlalu sukar menjadi pendengar. Berbagai pendekatan pendidikan yang selayaknya mensyaratkan porsi yang lebih banyak pada kehadiran tradisi literasi<sup>10</sup>. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki kemandirian dan minat baca dan diharapkan bisa membangkitkan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan rencana Perpustakaan Nasional menjadikan Program Literasi Informasi menjadi bagian Rencana Induk Perpustakaan Nasional tahun 2006-2015, rasanya menjadi kemustahilan dilakukan di sekolah mengingat masih terbatasnya SDM Pustakawan dan sarana perpustakaan yang ada. Apakah guru akan dijadikan Pustakawan? Di tengah beban berat yang telah diemban oleh guru, hal tersebut sulit dilaksanakan, karena guru tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam bidang kepustakawanan. Domain perpustakaan dimiliki oleh Pustakawan. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah melalui beberapa instansi terkait seperti Perpustakaan Nasional RI, Depdiknas dan lainnya memberikan solusi dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi calon Pustakawan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia.

### Analisa Jumlah Kebutuhan

Sejauh mana tingkat kebutuhan negara kita terhadap Pustakawan, hal ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kita dan pemerintah memandang perpustakaan dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam UU Sisdiknas, Pustakawan ditempatkan sebagai tenaga kependidikan, satu kelompok dengan laboran, teknisi sekolah dan sebagainya. Diperlukan kesadaran dan kemauan pemerintah dalam mengedepankan peran Pustakawan dalam sistem pendidikan kita. Dari data tabel 1 terdapat 229.187

<sup>9</sup> Rachmat Natadjudena: Perpustakaan Sekolah – Lahan Tidur Pustakawan. Orasi Ilmiah Pengukuhan Pustakawan Utama. 2006.

<sup>10</sup> Wachid Eko Purwanto: Menghidupi Tradisi Literasi: Problematika bagi Siswa, Guru, Sekolah dan Negara. <http://www.tandabaca.com/esai/esai.html> diakses 21-08-2007.

sekolah terdiri dari SD, SLTP, SLTA dan PT. Jika menganut “satu sekolah, satu perpustakaan, satu Pustakawan” maka seharusnya terdapat 229.187 perpustakaan, dan 229.187 orang Pustakawan. Apabila beberapa sekolah kepustakawanan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan 1000 Pustakawan tiap tahun, maka jumlah Pustakawan baru dapat dipenuhi dalam waktu 229 tahun lebih. Jadi ironis jika dilihat masih banyaknya calon Pustakawan kita yang menganggur, tidak bisa bekerja di perpustakaan karena minimnya formasi untuk mereka. Di beberapa sekolah sudah banyak Pustakawan profesional, namun karena statusnya tak lebih hanya sebagai tenaga “honorar” atau “magang”, mereka tidak bisa bekerja secara maksimal karena minimnya *salary* dan penghargaan lain yang tidak seimbang dengan beban kerja mereka. “Pustakawan juga manusia”. Mengingat arti penting perpustakaan dalam proses pendidikan dan usaha pencerdasan bangsa, sudah seharusnya diikuti dengan perimbangan jumlah Pustakawan yang memadai. Pemerintah perlu bersungguh-sungguh agar generasi Pustakawan Indonesia tidak layu sebelum menjadi Pustakawan profesional. Apapun *image* yang melekat pada Pustakawan di masyarakat Indonesia, Pustakawan tetap dibutuhkan. Keberadaan Pustakawan karena dibutuhkan.

### **Analisa Kondisi Perpustakaan – Pustakawan Sekolah**

Kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia banyak tidak difungsikan sebagai mana mestinya, hanya ramai dikunjungi oleh siswa pada saat tahun ajaran baru untuk pembagian buku paket pelajaran. Keberadaan perpustakaan sekolah seharusnya dapat dijadikan tempat atau sarana untuk membantu proses belajar mengajar, menumbuhkan minat baca, dan mendorong siswa belajar secara mandiri. Sesuai misinya, perpustakaan berfungsi sebagai sarana edukatif, informatif, riset dan rekreatif. Namun kenyataannya, belum semua sekolah memiliki perpustakaan. Dari data statistik 2005/2006 Depdiknas<sup>11</sup>, dari 15.342 sekolah menengah, terdapat 10.116 perpustakaan. Ini berarti bahwa rasio jumlah sekolah menengah dan perpustakaan sebesar 65,94%. Selain jumlahnya yang sangat minim ternyata kondisi perpustakaan tersebut sangat tidak memenuhi standar.

Berdasarkan data perpustakaan sekolah dan lembaga pendidikan lain disebutkan sebagai berikut: (1) dari 200.000 SD, ± 1 % yang sesuai standar; (2) dari 70.000 SLTP, ± 34 % yang sesuai standar; (3) 14.000 SLTA hanya 54 % yang sesuai standar; (4) 4.000 PT, ± 60 % yang sesuai standar. Dari data statistik di atas, terlihat bahwa pendidikan di Indonesia belum ditunjang oleh perpustakaan yang memadai. Menurut Suyanto, dikutip Romi, faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran antara lain karena belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal, baik oleh guru maupun peserta didik. Maka tidaklah mengherankan jika dalam hal kualitas sumber daya manusia, Indonesia menduduki peringkat yang lebih rendah daripada Vietnam<sup>12</sup>.

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas merekomendasikan bahwa keberadaan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar merupakan suatu keharusan. Hasil rekomendasi meliputi: (1) Pengadaan perpustakaan di setiap sekolah/kecamatan; (2) Pemberdayaan sarana prasarana perpustakaan; (3) Setiap sekolah memiliki Pustakawan yang profesional; (4) Guru dan siswa memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar; dan (5) Koordinasi antara perpustakaan sekolah

<sup>11</sup> Tabel 1. Persentase perpustakaan terhadap jumlah sekolah menurut status sekolah tiap propinsi. [http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn99-00/dikmen/statistik\\_dikmen2001.htm](http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn99-00/dikmen/statistik_dikmen2001.htm) diakses 10-08-2007.

<sup>12</sup> Romi Febriyanto Saputro. Perpustakaan, Sumber Ilmu yang Terabaikan. Harian Pikiran Rakyat. 2004.

dengan Perpustakaan Nasional, wilayah, umum, keliling, kecamatan, perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus/instansi.

Orasi ilmiah Rachmat Natadjudena menyatakan bahwa perpustakaan sekolah merupakan lahan tidur Pustakawan yang selama ini “*idle*” dan hampir mubazir karena tidak pernah tersentuh oleh Pustakawan. Menurut catatannya, selama ini belum ada satu Pustakawanpun yang bekerja di perpustakaan Sekolah Dasar, dan hanya beberapa orang yang bekerja di perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan manifesto perpustakaan sekolah tahun 2000 dari *IFLA/UNESCO* diharapkan ada perubahan dalam sistem pendidikan yang memungkinkan lahan sekolah untuk dimasuki oleh orang-orang profesional di bidang perpustakaan.

### **Pengembangan Profesi Pustakawan Pemasyarakatan Profesi**

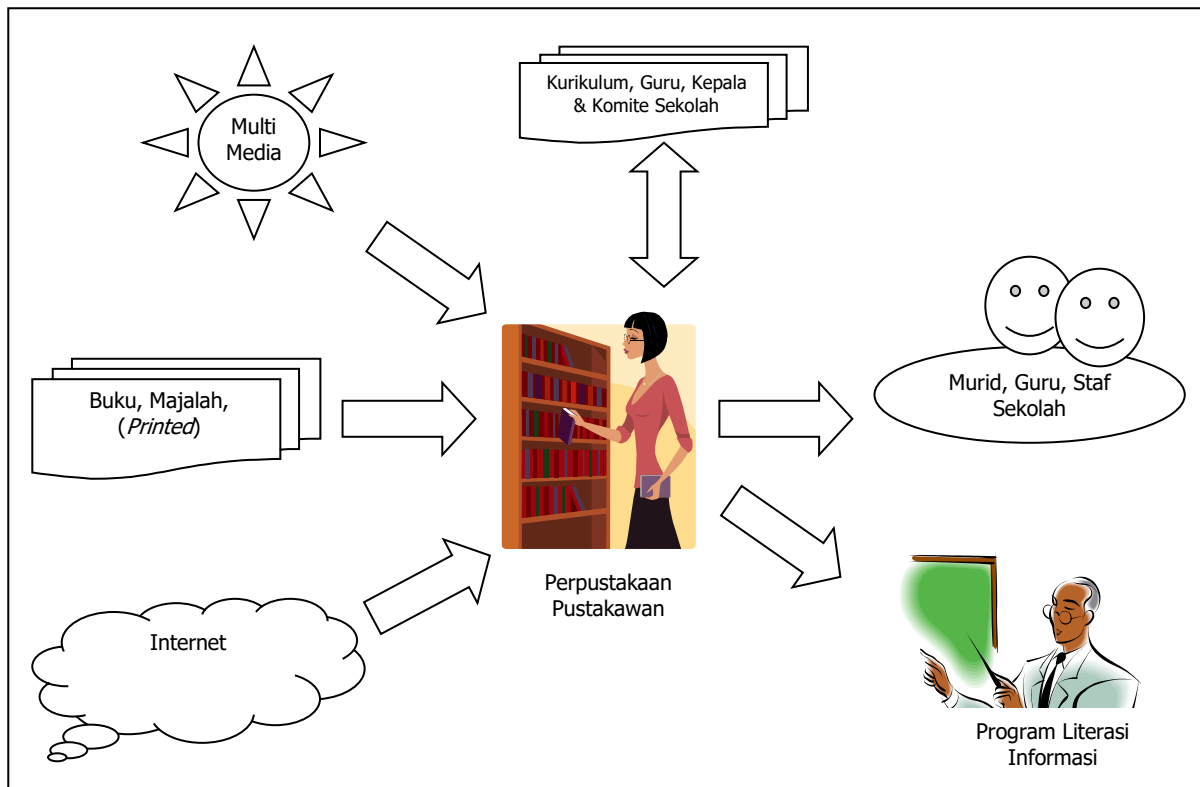
Seiring perkembangan teknologi informasi, kemampuan Pustakawan juga telah meningkat seiring perkembangan kepustakawanan yang pada awalnya hanya untuk mengelola perpustakaan, kini telah meluas menjadi mengelola informasi (*Information Management*), dan kemudian mengelola pengetahuan (*Knowledge Management*). Namun “*image*” di masyarakat sebagai *second profesion* masih melekat, bahkan celaknya juga melekat pada sebagian pengambil kebijakan di negeri kita. Tentu saja hal ini akan sangat merugikan Pustakawan sebagai “ahli informasi” sebagai produk program kepustakawan modern. Apa yang dipelajari dan juga kompetensi yang dimiliki, di beberapa perpustakaan modern keberadaan Pustakawan sebenarnya telah berkembang jauh meninggalkan tradisi lama sebagai *book man* yang berkutat dengan tumpukan dan sirkulasi buku. Sebagian mereka telah berhasil mengembangkan sistem informasi di berbagai lembaga informasi, tidak sebatas perpustakaan saja, namun juga institusi lain seperti stasiun televisi, radio, juga media cetak seperti koran, majalah dan lain sebagainya.

Namun demikian, kemampuan dan ketrampilan memasarkan diri, serta membangun “*image*” profesi yang lebih meluas masih kurang dilakukan para profesional Pustakawan. Usaha untuk memasyarakatkan profesi menjadi program kerja Pustakawan secara bersama-sama harus dimulai Pustakawan sendiri, organisasi IPI beserta asosiasi-asosiasinya, lembaga pendidikan Pustakawan, guna memberikan apresiasi yang benar pada masyarakat dan pasar kerja. Karena banyak sekali institusi yang menanti sentuhan tangan dan aliran ide dari Pustakawan yang cerdas untuk mengelolanya.

### **Perluasan Peran Pustakawan Sekolah**

Manifesto perpustakaan sekolah yang dikeluarkan oleh *IFLA/UNESCO* tahun 2000 menyatakan bahwa perpustakaan sekolah merupakan bagian integral proses pendidikan yang didukung oleh Pustakawan dengan kualifikasi profesional dalam tugasnya. Hal ini seperti diamanatkan dalam pasal 1 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyebutkan bahwa perpustakaan sekolah adalah sebagai salah satu sarana dalam menunjang proses belajar dan mengajar di sekolah. Perpustakaan sekolah dewasa ini bukan hanya unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi murid, tapi juga merupakan bagian integral sistem pembelajaran. Artinya, penyelenggaraan perpustakaan sekolah harus sejalan dengan visi dan misi sekolah, dengan mengadakan bahan bacaan bermutu sesuai kurikulum. Seiring kemajuan teknologi informasi, perpustakaan sekolah

diharapkan tidak hanya menyediakan buku bacaan saja, namun juga menyediakan sumber informasi lainnya, seperti bahan audio-visual dan multimedia, serta akses informasi ke internet. Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut tidak serta merta diikuti kemampuan siswa dalam memberdayakannya, karena itu diperlukan perluasan fungsi dan peran perpustakaan (Pustakawan) dalam mengembangkan program literasi informasi (*information literacy*). Keahlian literasi informasi sangat membantu siswa menjadi seorang individu yang cerdas dan mandiri, sehingga berhasil dalam belajar dan kehidupan selanjutnya.



Gambar 1. Perluasan Peran dan Fungsi Perpustakaan (Pustakawan)

### Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pustakawan

Salah satu upaya meningkatkan mutu perpustakaan adalah dengan menyediakan Pustakawan yang berkualitas dan profesional. Harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang didukung oleh praktisi profesi yang dapat dijamin mutunya. Sebagai tenaga profesional, Pustakawan diharapkan tidak hanya memiliki kualifikasi akademik, namun juga harus memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kompetensi Pustakawan yang menjadi acuan penilaian kompetensi. Untuk menjamin pengembangan kemampuan Pustakawan sesuai tuntutan perkembangan, sertifikasi kompetensi ini perlu diperbaharui oleh Pustakawan lima tahun sekali. Sehubungan dengan hal ini perlu dikembangkan sistem penjaminan mutu untuk profesi Pustakawan. Usaha sertifikasi Pustakawan perlu dimulai misalnya kompetensi bidang penguasaan bahasa Inggris dan bidang TIK. Menurut Endang untuk menjadi Pustakawan mandiri diperlukan bentuk-bentuk kompetensi seperti berikut: **Kompetensi Utama**, meliputi: (1) Pemahaman insititusi induk perpustakaan; (2) Orientasi Pengguna; (3) Kepemimpinan; (4) Perencanaan



dan monitoring; (5) Komitmen; (6) Inovasi; (7) Komunikasi. **Kompetensi Teknis Umum**, meliputi (1) Penguasaan komputer; (2) Penguasaan bahasa Inggris; (3) Sadar Biaya; (4). Modeling (Sebab & Akibat); (5) Proses Bisnis. **Kompetensi Teknis Khusus**, meliputi: (1) Pengetahuan Kepustakawanan; (2) Literasi Informasi; (3) Katalogisasi.

### **Pembenahan Manajemen Pustakawan**

Proses rekrutmen, pengangkatan dan penempatan Pustakawan selama ini masih belum jelas konsepnya, masih banyak kesenjangan penyebaran di berbagai jenis dan tingkatan perpustakaan. Selain itu, banyak pengangkatan Pustakawan kita tidak mempunyai latar belakang pendidikan kepustakawanan dan penyebarannya masih menumpuk di pulau Jawa. Di tahun-tahun lalu, banyak Pustakawan diangkat bukan dengan latar belakang ilmu perpustakaan. Melalui alih jalur selama 3 bulan seseorang dapat menjadi seorang pustakawan Tingkat Ahli, hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi lulusan perpustakaan yang memang mencita-citakan menjadi Pustakawan sejak awal kuliah. Akibatnya terjadi banyak kesenjangan di perpustakaan. Penempatan Pustakawan di berbagai daerah dan berbagai jenis perpustakaan kurang diikuti dengan pertimbangan yang matang. Jika kita lihat pada data Pusat Pengembangan Pustakawan ada beberapa kabupaten di Indonesia yang tidak memiliki Pustakawan berstatus PNS. Oleh karena itu ke depan seleksi dan penempatan Pustakawan harus benar-benar melalui analisa yang benar dan terencana agar jumlah Pustakawan yang dibutuhkan seimbang.

### **Pembenahan Sistem Renumerasi Pustakawan**

Dengan alasan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, selama ini tunjangan yang ditetapkan untuk Pustakawan masih sangat rendah dibandingkan dengan profesi lain. Hal ini diperburuk oleh sedikitnya peluang Pustakawan mengembangkan profesionalisme melalui studi lanjut, atau penugasan lainnya yang berorientasi pada pengembangan karir. Menyadari sistem renumerasi yang kurang menantang dan kurang memperhatikan kinerja tersebut, agar profesionalitas Pustakawan meningkat. Pembinaan karir harus merata bagi Pustakawan Tingkat Ahli maupun Pustakawan Tingkat Terampil. Peluang jabatan dan pembinaan karir, dan profesionalisme harus diutamakan bagi Pustakawan yang berprestasi. Pembentukan yang demikian memerlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan partisipasi masyarakat secara luas.

### **Pengembangan Pola Pendidikan Profesi Pustakawan**

Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu konsekuensi pengakuan Pustakawan sebagai profesi adalah diperlukannya pendidikan profesi yang berbasis pendidikan tinggi. Pendidikan formal Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam berbagai jenjang, mulai dari tingkat Diploma, Sarjana hingga Magister meliputi UI, UNPAD, USU dan UNAIR, Yarsi dan UNINUS. Adapun program pendidikan S2 diselenggarakan oleh UI, UNPAD, UGM dan IPB<sup>13</sup>. Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ini sampai jenjang S3, terutama untuk tenaga pengajar harus melalui sekolah ke luar negeri. Selain karena keterbatasan bahasa asing, kesempatan untuk memperoleh beasiswa di bidang ini sangat kecil. Perlunya kemitraan dengan negara penyedia dana dapat dijalin melalui perwakilan yang ada, agar bidang ini dapat terus berkembang pesat sebagaimana mestinya.

<sup>13</sup> Ninis Agustini Damayanti. Pengembangan Program Pendidikan S1 dan S2 Ilmu Informasi & Perpustakaan di Indonesia. Lokakarya Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan di Indonesia, Jakarta Juli 2005.

Yang terpenting adalah mampu menghasilkan sumber daya yang handal dan mampu berkompetensi tidak saja di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Mengingat arti penting perpustakaan dalam pencerdasan bangsa dan proses pendidikan, keberadaan perpustakaan sudah seharusnya diikuti dengan perimbangan jumlah Pustakawan yang memadai. Pemerintah perlu bersungguh-sungguh untuk mengantarkan putra-putri terbaik Indonesia yang sudah siap meniti karir di bidang kepustakawanan. Apapun *image* yang melekat pada Pustakawan masyarakat Indonesia, Pustakawan tetap dibutuhkan. Keberadaan Pustakawan karena dibutuhkan.
2. Rendahnya mutu perpustakaan di Indonesia banyak disebabkan oleh sedikitnya jumlah Pustakawan yang menangani perpustakaan khususnya di sekolah.
3. Kemandirian Pustakawan sebagai profesi sangat bergantung pada bentuk dan tingkat profesionalisme serta kompetensi yang dimiliki Pustakawan.

### Saran

1. Pemerintah perlu segera mengangkat Pustakawan di setiap perpustakaan baik di lingkup sekolah maupun lingkup daerah.
2. Perpustakaan Nasional RI harus lebih giat mendesak pemerintah untuk memberikan kesempatan menjadi PNS sebagai Pustakawan, baik bagi yang masih berstatus honorer maupun bagi yang magang kerja di berbagai perpustakaan.
3. Sarana prasarana perpustakaan yang ada harus diberdayakan melalui program literasi informasi.
4. Setiap sekolah perlu memiliki Pustakawan yang profesional, yang bertugas khusus mengelola perpustakaan.
5. Guru harus memberikan tugas yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar.
6. Perlu adanya koordinasi antara perpustakaan sekolah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Umum, perpustakaan keliling, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus/instansi.

### Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas. Rekomendasi Hasil Seminar Pengembangan Perpustakaan sebagai Sumber Belajar.
- Endang Emawati. *Kompetensi, Komitmen dan Interpreneurship Pustakawan dalam Mengelola Perpustakaan di Indonesia*. 200?
- Harkrisyati Kamil: *Peran Pustakawan dalam Manajemen Pengetahuan*. Disampaikan dalam rapat Kerja Pusat XIII dan Seminar Ilmiah Nasional IPI, Pekanbaru Riau. Juni 2005.
- Hernandono: *Meretas Kebuntuan Kepustakawanan Indonesia Dilihat Dari Sisi Sumber Daya Tenaga Perpustakaan*. Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Pustakawan Utama. 2005.
- IFLA/NUNESCO. *Pedoman Perpustakaan Sekolah*. 2006.
- Melling Simanjuntak. *Kepustakawanan Alternatif*. Makalah Kongres Nasional IPI, 2005.

- Ninis Agustisini Damayanti. *Pengembangan Program Pendidikan S1 dan S2 Ilmu Informasi & Perpustakaan di Indonesia*. Lokakarya Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan di Indonesia. Jakarta, Juli 2005.
- Rachmat Natadjumena: *Perpustakaan Sekolah - Lahan Tidur Pustakawan*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Pustakawan Utama. 2006.
- Romi Febriyanto Saputro. *Perpustakaan, Sumber Ilmu yang Terabaikan*. Pikiran Rakyat. 2004. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0204/02/teropong/lainnya02.htm> diakses 03-07-2006.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Perpustakaan Nasional RI: Naskah Akademi RUU Perpustakaan 2006.
- Wachid Eko Purwanto: *Menghidupi Tradisi Literasi: Problematika bagi Siswa, Guru, Sekolah dan Negara*. <http://www.tandabaca.com/esai/esai.html> diakses 21-08-2007.
- Zaslina Zainuddin. *Kebutuhan Pustakawan Profesional di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi. Vol. 1 No.1 Juni 2005.